

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, S.R. (2014). Kapitasi JKN Dinilai Terlalu Rendah. *Beritasatu.com*. Diakses 28 April 2015, dari <http://www.beritasatu.com/kesra/160862-kapitasi-jkn-dinilai-terlalu-rendah.html>
- Arikunto, S. (2006) *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Australia Indonesia Partnership for Health System Strenghtening (AIPHSS). (2013). Mengembalikan Fungsi Puskesmas. *Australia Indonesia Partnership for Health System Strenghtening (AIPHSS)*. Diakses pada 26 Februari 2016, dari <http://aiphss.org/id/restoring-the-function-of-puskesmas/>
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2014a). *Panduan Praktis Pelayanan Gigi & Prothesa Gigi*. Jakarta:Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2014b). *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan*. Jakarta:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- Baffour, P.A., Oppong, R., dan Boateng, D. (2013). Knowledge, perceptions and expectations of capitation payment system in a health insurance setting: a repeated survey of clients and health providers in Kumasi, Ghana. *BioMed Central Public Health*, 13:1220, 1-9.
- Budiarto, W., dan Kristiana, L. (2015). Pemanfaatan Dana Kapitasi Oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Penyelenggaraan JKN. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 18:4, 437-445.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Rekapitulasi Puskesmas Kabupaten Kota Yogyakarta. Diakses pada 28 Juni 2016, dari http://www.bankdata.depkes.go.id/puskesmas/laporan_puskesmas_detail_kab.php?kd_propinsi=34&kd_kabupaten=71&tahun=2014&nama_kabupaten=kota%20yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.

- Despitasaki, M. (2014). Memangnya Hanya Peserta BPJS yang Harus Puas? Tenaga Kesehatan Juga Harus Puas. *Kompasiana*. Diakses 18 April 2015, dari <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/10/28/memangnya-cuma-peserta-bpjs-yang-harus-puas-tenaga-kesehatan-juga-harus-puas-698953.html>
- Dewanto, I. (2013). Dokter Gigi dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Diakses 30 April 2015, dari <http://id.scribd.com/doc/189631744/Drg-Dalam-Sistem-Jamkesmas#scribd>
- Dewanto, I., dan Lestari N.I. (2014). *Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kedokteran Gigi dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: PDGI.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2012). *Profil Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011*. Yogyakarta:Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta
- Erma, R., (2014,2 Januari). Mengapa Harus Layanan Kesehatan Sistem Khilafah?. *Hizbut Tahrir Indonesia*. Diakses 18 April 2015, dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/02/mengapa-harus-layanan-kesehatan-sistem-khilafah/thibbun-nabawi-ilustrasi-120612231328-814/>
- Freudenberg, N., Klitzman, S., dan Saegert, S. (2009). *Urban Health dan Society: Interdisciplinary Approaches to Research dan Practice*. United States of America:Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Geswar, R.K., Nurhayani dan Balqis. (2013). Kesiapan *Stakeholder* Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Gowa.
- Goldstein, D.E. (1996). *Building and Managing Effective Physician Organizations Under Capitation*. United States of America:Aspen Publisher, Inc.
- Hadi, S. (1981). *Metodologi Research*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hendartini, Y. (2008). Determinan Kinerja Dokter Keluarga yang Dibayar Kapitasi. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, vol. 11(2), 77-84.
- Huey, B.M. dan Wickens,C.D. (1993). *Workload Transition: Implication for Individual and Team Perfomance*. Washington. D.C:National Academy Press.

- International Labour Office. (2014). Thailand Universal health Coverage. *Social Protection In Action: Innovative Experiences*. Diakses 27 Mei 2015, dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_6612.pdf
- Jamkes Indonesia. (2016). *Minim Pemahaman Sistem Rujukan BPJS Kesehatan*. Diakses pada 24 Februari 2016, dari <http://jkn.jamsosindonesia.com/home/cetak/254/Minim%20Pemahaman%20Sistem%20Rujukan%20BPJS%20Kesehatan>
- Januraga, P.P., Suryawati, C., Listyowati, R., dan Nopiyani, M.S. (2010). Analisis Per Kapita Sebagai Upaya Advokasi Pengendalian Program Jaminan Kesehatan Jembrana. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, vol. 13(1), 33-38.
- Karya, T.B., dan Kusuma, A.P. (2014). Hubungan Antara Persepsi Kesesuaian Tarif Kapitasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kepuasan Kerja Dokter Praktik Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Semarang Tahun 2014. 1-14.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Datadan Informasi Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta:Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Buku Panduan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta:Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. (2006). *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*. Jakarta:Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1415/MENKES/SK/X/2005 tentang Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga.
- Khariza, H.A. (2015). Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif tentang Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 3(1), 1-7.
- Kinhan, P. (2014). Population Health Management: Navigating succesfully from volume to value. *GE Healthcare*.

- Kuncoro, S. (2015). Apa Itu Sistem Pembayaran Kapitasi: Sistem Pembayaran Pada FKTP BPJS. *Pasien Sehat*. Diakses 24 Februari 2016, dari <http://www.pasiensehat.com/2015/09/apa-itu-sistem-kapitasi-pembayaran-bpjs-kesehatan.html>
- Kusuma, A.A., dan Soesatyo, Y. (2014). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 375-386.
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung:Alfabeta.
- Limwatannnon, S., Neelsen, S., O'Donnel, O., Prakongsai, P., Tangcharoensathien, V., Doorslaer, E.V., dan Vongmongkol, V. (2013). Universal Coverage on A Budget: Impact On Health Care Utilization and Out Of Pocket Expenditures in Thailand. *Institute of Health Policy and Management*. 1-33.
- Muninjaya. (2004). *Manajemen Kesehatan*. Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran (EGC).
- National Health System of England. (2014). *Capitation:a potential new payment model to enable integrated care*. England:Monitor Making the Health Sector Work for Patients.
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta:Salemba Medika.
- Parys, J.V. (2014). How Do Managed Care Plans Reduce Healthcare Cost?. *Job Market Paper*, 1-52.
- Pearce, J.W. (2012). The Return Of Capitation Preparing for Population-Based Health Care (Healthcare Financial Management). *Insurancenewsnet.com*. Diakses pada 24 Februari 2016, dari <http://insurancenewsnet.com/oarticle/the-return-of-capitation-preparing-for-population-based-health-care-%5BHealthcare-a-352279>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang SARPRAS Kesehatan Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Ridarineni, N., dan Djibril, M. (2014). Kapitasi JKN Dokter Gigi Sama dengan Tarif Parkir. *Republika*. Diakses 24 Februari 2016, dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/01/07/mz1ala-kapitasi-jkn-dokter-gigi-sama-dengan-tarif-parkir>

Riwidikdo, H. (2012). *Statistik Kesehatan*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.

Sakunphanit, T. (2015). *Thailand: Universal Health Care Coverage Through Pluralistic Approaches*. ILO: Thailand.

Siregar, T. (2015). BPJS Watch: Pelaksanaan JKN Banyak Masalah. *Republika*. Diakses 28 Juni 2016, dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/06/24/nqfssa4-bpjs-watch-pelaksanaan-jkn-banyak-masalah>.

Sitepu, A., Sarosa, A., Meilissa, Y., dan Luntungan, N., (2015). Paradigma Sehat: Kunci Sukses JKN. *Center for Indonesia 's Strategic Development Initiatives*. Diakses pada 20 Februari 2016, dari <http://cisdi.org/articles/view/paradigma-sehat-kunci-sukses-jkn>

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Widiyani, R. (2014, 15 April). Biaya Kapitasi untuk Dokter Gigi Terlalu Minim. *Kompas*. Diakses pada 18 April 2015, dari <http://health/kompas.com/read/2014/01/13/1206201/Biaya.Kapitasi.untuk.Dokter.Gigi.Terlalu.Minim>

Yandrizal & Desri, S. (2015). Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 4(1), 107-114

Yustina, E.H. (2015). Hak Atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1-16.

